



TRANSFORMASI ADMINISTRASI NEGARA:

PERSPEKTIF MANAJERIALISME

Penyusun :
Sintaningrum
Heru Nurasa
Yogi Suprayogi Sugandi



TRANSFORMASI ADMINISTRASI NEGARA : PERSPEKTIF MANAJERIALISME

Penyusun :
**Sintaningrum
Heru Nurasa
Yogi Suprayogi Sugandi**



Falsafa
2011

**TRANSFORMASI ADMINISTRASI
NEGARA; PERSPEKTIF MANAJERIALISME**

Sintaningrum; Heru Nurasa;
Yogi Suprayogi Sugandi

Desain Cover & Lay Out
What If Artwork

Cetakan Pertama, Juni 2011

ISBN 978-602-99311-2-9

Penerbit

Falsafa

Jl. Kembang Raya No. 11, Kwitang Senen,
Jakarta Pusat

kurniaesa.script@gmail.com

Pemesanan Buku

Penerbit Falsafa

Jl. Kembang Raya No. 11, Kwitang Senen,
Jakarta Pusat

kurniaesa.script@gmail.com

Pengantar

Alhamdulillah *rabbi'l 'aalamin*, buku transformasi administrasi negara dengan dua jilid ini adalah kumpulan makalah yang di dapat dari konferensi administrasi negara ketiga di Bandung pada 6-8 Juli 2010, konferensi administrasi negara yang dilaksanakan di Bandung ini adalah keterusan dari konferensi administrasi negara satu dan dua yang dilaksanakan di Yogyakarta (UGM) dan Surabaya (Unair). Berbagai kumpulan makalah ini yang sangat banyak diterima oleh panitia konferensi menyebabkan tidak semua makalah masuk dalam buku ini. Walaupun ada berbagai makalah yang tidak diterima dalam buku ini dikarenakan faktor teknis seperti makalah sudah diterbitkan ditempat lain dan sebagainya.

Hasil-hasil dari makalah ini mengalami proses editing oleh tiga editor dari konferensi administrasi negara tiga. Buku pertama yang berjudul transformasi administrasi negara: perspektif manajerialisme, mengemukakan berbagai perubahan dalam konsep manajemen pada sektor publik. Kemudian buku kedua yang berjudul transformasi administrasi negara: perspektif politik dan kebijakan publik ini juga mengalami perubahan yang sangat signifikan terutama setelah era reformasi saat ini, dimana politik suatu bangsa sangat berperan dalam menentukan suatu kebijakannya.

Makalah-makalah ini mengalami proses editing sehingga ada beberapa kata-kata, kalimat atau tanda yang berubah, tetapi tidak merubah makna yang terkandung di dalamnya. Proses editing ini memakan waktu yang sangat lama karena berbagai makalah tersebut memang memiliki kekhasan masing-masing, sehingga kami memerlukan penelaahan dan terkadang perlu mengkonfirmasi ulang pada para penulis.

Kami sangat berterima kasih sekali atas kepercayaan para teman-teman di program studi ilmu administrasi negara, FISIP, UNPAD serta LP3AN (Lembaga Penelitian, Pelatihan dan Pengkajian Administrasi Negara) yang telah bersusah payah menyelenggarakan acara konferensi ini sehingga dapat berlangsung dengan baik.

Pada momen ini juga perlu kami sampaikan pada konferensi administrasi negara ketiga ini juga tercetus suatu organisasi ilmu administrasi publik yang diharapkan menjadi ajang silaturahmi para pakar dan pemerhati administrasi negara di Indonesia. Kami haturkan juga terima kasih yang tidak terkira pada IAPA (*Indonesia Association for Public Administration*) yang sudah menjadi wadah perkumpulan ilmuwan dan pemerhati administrasi negara. Buku ini diluncurkan pertama kali di Konferensi Administrasi Negara keempat di Makasar, agar momen dari konferensi ini tidak berkurang, dan pemakalah tertarik lagi untuk menulis makalahnya di konferensi-konferensi berikutnya.

Terakhir kami harap, buku kumpulan makalah ini dapat memberikan makna yang besar bagi para pemerhati dan pakar administrasi publik, baik secara konsepsi ataupun praktis.

Bandung, 31 Mei 2011

Editor

DAFTAR ISI

Pengantar Daftar Isi Pendahuluan

Adm Publik Kontemporer

Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia: Refleksi Terhadap Lokus Studi Administrasi Publik (Asal Wahyuni, Erlin Mulyadi, Sri Yuliani) (17)

Point Kritis dalam Upaya Mewujudkan Program dan Anggaran Pembangunan yang Responsif Gender (Nengnyanti) (27)

Optimalisasi Peran Pemerintah Dalam Kelembagaan Zakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan (Eva Fanida) (35)

Membangun Citra Perusahaan Melalui Program CSR (Corporate Social Responsibility) di Indonesia (Meirinawati, Indah Prabawati) (59)

Manajemen Publik

Implementasi Budaya Korporat The Telkom Way 135 (Studi Pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk, Divre V Jatim) (Dian Arlupi Utami) (75)

Penataan Organisasi Perangkat Daerah: Studi Penataan Organisasi Berdasar PP No. 41 Tahun 2007 Di Kabupaten Muara Enim Dan Kabupaten Kaimana (Budiarjo, S.Sos., Ma) (93)

Insentif Berbasis Kinerja Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Individu Dalam Organisasi (Denok Kurniasih) (113)

Akuntansi Sektor Publik

"Kritik Kontemporer Fungsi Dan Peran Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Teori Akuntabilitas" (Andries Lionardo) (129)

Formasi Civil Society Dalam Mendorong Akuntabilitas Sektor Publik (Andi Luhur Prianto) (141)

Good Governance: Reformasi Akuntansi Pemerintahan (Tetet Fitrijanti, Dede Mariana) (157)

E-Government, Hubungan IT dengan Administrasi Publik

E-Government: Hubungan Teknologi Informasi dengan Administrasi Publik (Dayat Hidayat) (173)

Peran Social Media Networking For Gov 2.0 di Indonesia (Anis Fuad) (189)

E-Government : Hubungan IT dengan Administrasi Publik (Junaidi) (201)

Kualitas Website Pemerintah Daerah Sebagai Media Pendukung Good Local Governance (Puguh Prasetya Utomo) (215)

Analisis IT Governance di Beberapa Daerah di Indonesia (Ayuning Komara) (237)

Inovasi

Mendorong Inovasi Pemda Melalui Penerapan Gerakan One Village One Product (OVOP) (Suryanto, S.Sos, M.Si.) (245)

Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Produk Unggulan: Pemberdayaan Masyarakat Atau Eksploitasi? (Sri Wahyuni) (261)

Transformasi Administrasi Negara: Perspektif Manajerialisme

Heru Nurasa¹

Sintaningrum²

Yogi Suprayogi Sugandi³

Abstrak

Makalah ini akan memberikan ulasan tentang pentingnya perubahan dalam ilmu administrasi negara yang perlu menyesuaikan diri dengan keadaan bangsa dan negara di Indonesia. Dalam perspektif manajemen ini, administrasi negara di perspektifkan sebagai manajemen yang mengatur masyarakat/publik. Perubahan ini menyangkut pada berbagai aspek pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Makalah ini juga akan memaparkan beberapa temuan terbaru dari hasil konferensi administrasi negara tiga, dimana dalam konferensi tersebut menemukan beberapa makalah yang dapat menjadi acuan bahwa ilmu administrasi negara mengalami perubahan/transformatasi sangat cepat, dengan semakin majunya ilmu-ilmu yang mendukung ilmu tersebut.

Kata Kunci: Administrasi negara, Manajemen dan Perubahan.

Pendahuluan

Perkembangan Ilmu Administrasi Negara pada saat ini dirasakan cukup pesat di Indonesia, ini diperlihatkan dengan semakin tumbuhnya lembaga-lembaga pendidikan maupun non-pendidikan yang bergerak di bidang administrasi negara. Administrasi negara sendiri di Indonesia memiliki berbagai sudut pandang yang berbeda-beda pandangan. Ada dua pandangan atau perspektif yang tertarik akan diangkat dalam judul buku ini, perspektif pertama adalah perspektif manajemen dan kedua adalah perspektif politik dan kebijakan publik. Dalam sudut pandang manajemen sendiri administrasi negara ditempatkan sebagai pelaksana dan pengeksekusi berbagai aktifitas di dalam negara, sedangkan dalam perspektif politik dan kebijakan publik, administrasi negara dipandang sebagai perancangan dan pengevaluasi aktifitas di dalam negara. Aktifitas-aktifitas ini kemudian yang saling lengkap melengkapi dari perkembangan administrasi negara di Indonesia.

Perkembangan ini diindikasikan dengan semakin dinamisnya ilmu ini dengan berbagai perkembangan nomenklatur, mulai dari ilmu tata negara, administrasi negara, administrasi publik dan yang sampai mutakhir ini ilmu manajemen dan kebijakan publik. Perkembangan inilah yang dijanjikan oleh tumbuh dan berkembangnya suatu ilmu, pandangan ini di landasi oleh pemikiran Rosenbloom dan Kravchuck (2009) tentang core ilmu administrasi negara antara lain hukum, politik dan manajemen, perspektif ini juga didukung oleh Eran V. Gadot (2001) yang menuliskan core ilmu administrasi negara itu antara lain organisasi dan bisnis, ilmu budaya dan sosiologi serta politik dan kebijakan publik

Perspektif inilah yang menjadi kekuatan arus utama dalam administrasi negara di Indonesia. Transformasi adalah bentuk perubahan yang sekarang menjadi trend dari ilmu administrasi negara, pengelolaan negara secara lebih efisien, efektif dan ekonomis seperti yang dituliskan Peter F Drucker (2000). Pengelolaan ini pada akhirnya

¹ Dosen Administrasi Negara, FISIP, UNPAD, Bandung.

² Dosen Administrasi Negara, FISIP, UNPAD, Bandung.

³ Dosen Administrasi Negara, FISIP, UNPAD, Bandung.

menuntut perubahan cara pandang ilmu ini sendiri sebagai ilmu yang mengikuti perubahan sosial di Indonesia. Perubahan ini dilihat dari semakin dinamisnya budaya dan politik di Indonesia, dominasi politik ini terutama lebih dititik beratkan kepada menghasilkan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran dan bagaimana melaksanakan kebijakan tersebut secara konsisten.

Djaja Saefullah (2010) menuliskan perubahan ini terutama pada nilai-nilai keragaman masyarakat Indonesia sendiri, sehingga pengelola negara atau pemerintah perlu mengikuti arus ini sebagai salah satu pengayom masyarakat. Pemerintah sebagai salah satu bidang kajian dalam ilmu administrasi negara di Indonesia ini juga sangat terpengaruh oleh arus globalisasi yang sangat cepat merambat di Indonesia dengan semakin membuka dirinya Indonesia dalam bidang ekonomi. Arus investasi yang sangat tinggi mencirikan bahwa administrasi negara Indonesia jua harus mampu mengimbangi berbagai korporasi-korporasi internasional yang terus masuk ke Indonesia.

Perubahan Mendasar dalam Manajemen Publik

Owen Hughes (2009) menuliskan bahwa Perkembangan ilmu manajemen publik ini berkembang setelah Taylor memperkenalkan *scientific management* pada masyarakat administrasi publik. Pada bab ini penulis akan memaparkan tentang arti pentingnya manajemen yang rasional pada sektor publik, karena selama ini seolah-olah kajian tentang publik ini sangat berkaitan dengan konsepsi negara, bahkan dalam bukunya Merilee S Grindlle (1990) menuliskan bahwa kajian ilmu administrasi publik terlalu banyak kajian tentang negara (*too much state*), padahal ilmu administrasi publik sebagai ilmu sosial dan dikategorikan sebagai *social engineering* (Phillip M Hauser, 1972) harus banyak merangkul kepentingan-kepentingan publik sebagai salah satu alasan utamanya mengkaji tentang masalah publik.

Pada dasarnya, administrasi berarti petunjuk berikut dan manajemen berarti pencapaian hasil dan mengambil tanggung jawab pribadi untuk melakukannya (Owen Hughes, 2007). Sebagai contoh Rainey (1990) berpendapat, manajemen publik memiliki asal-usul semantik yang menyiratkan mengambil hal-hal di tangan dan ini menunjukkan semacam suatu ketegasan dan efisiensi yang dikaitkan dalam stereotip untuk manajemen bisnis. Bagaimana manajemen berbeda dari administrasi dapat melihat tulisan Allison (1982) mengacu sebagai fungsi pada manajemen umum. Fungsi manajemen umum memiliki pengertian sebagai berikut (dalam Owen Hughes, 2007):

Strategi:

1. Menetapkan sasaran dan prioritas untuk organisasi (atas dasar ramalan lingkungan eksternal dan kapasitas organisasi).
2. Menyusun rencana operasional untuk mencapai tujuan tersebut.

Pengorganisasian dan Staf:

1. Dalam mengorganisir, manajer perlu menetapkan struktur (unit dan posisi dengan otoritas ditugaskan dan tanggung jawab) dan prosedur untuk mengkoordinasikan kegiatan dan mengambil tindakan). Dalam kepegawaian juga mencoba untuk sesuai dengan orang yang tepat dalam pekerjaan kunci.

2. Mengarahkan personil dan sistem manajemen personil: kapasitas organisasi itu diwujudkan terutama di anggotanya dan keterampilan dan pengetahuan mereka. Merekrut manajemen personalia sistem, memilih, mensosialisasikan, kereta api, penghargaan, menghukum, dan keluar modal manusia organisasi, yang merupakan kapasitas organisasi untuk bertindak untuk mencapai tujuan dan untuk menanggapi arahan khusus dari manajemen.
3. Kinerja Pengendalian: berbagai sistem manajemen informasi termasuk anggaran operasional dan modal, rekening, laporan, dan sistem statistik, penilaian kinerja, dan evaluasi produk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan dan dalam mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan.

Mengelola Konstituen Eksternal

1. Berurusan dengan subyek 'eksternal' unit organisasi untuk beberapa kewenangan umum: sebagian besar manajer umum harus berurusan dengan manajer umum dari unit lain dalam organisasi yang lebih besar di atas, lateral dan di bawah untuk mencapai tujuan unit mereka.
2. Berurusan dengan organisasi independen: agen dari cabang lain atau tingkat pemerintahan, kelompok kepentingan, dan perusahaan-perusahaan swasta yang dapat mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mencapainya.
3. Berurusan dengan pers dan publik atas tindakan atau untuk mencapai persetujuan dari publik.

Atas pandangan itulah maka terdapat perubahan yang besar dalam ilmu manajemen secara klasik, ini dapat diperlihatkan dengan semakin berkembangnya perubahan dalam manajemen di beberapa organisasi pemerintahan, organisasi pemerintah menjadi cenderung lebih gemuk, karena setiap fungsi harus diisi oleh beragam keahlian dari berbagai sektor dengan tunjangan kinerja yang berbeda-beda disetiap lini. Sebagai contoh pada sektor keuangan di Indonesia, para pegawai administrasi disini memiliki tunjangan kinerja yang berbeda dengan beberapa lembaga lainnya, padahal jika dilihat secara mendalam pegawai negeri sipil semua harus sama dalam hal pengajian dan tunjangan.

Bergeraknya Paradigma *New Public Management*

Meluasnya ide Osborne dan Gaebler (2005) tentang mewirusakan birokrasi di Amerika Serikat menyebabkan ide NPM ini mulai menyebar ke seantero jagat. Penyebaran ini yang memungkinkan suatu pemerintahan memiliki inovasi dan kreatifitas yang lebih tinggi, padahal di sektor publik ini terkenal dengan kekakuan, kerigidan dan tertutupan. NPM menjadi "pemecah" kebuntuan di sektor publik di Indonesia ini, sebagaimana yang dituliskan dalam beberapa makalah dari konferensi administrasi negara ketiga di Unpad Bandung, Jawa Barat. Beberapa makalah memperlihatkan keberagaman terutama dalam menyikapi tunjangan kinerja dari beberapa daerah di Indonesia serta beberapa perusahaan milik pemerintah. Keragaman inilah menyebabkan perubahan dalam aksi manajemen. Manajemen pemerintahan di Indonesia menjadi semakin dinamis. Dalam beberapa literatur asing menuliskan tentang polemik diskresi, dalam pertanyaan besarnya kemudian, apakah memungkinkan untuk

melakukan inovasi, kreatifitas dan kreasi di sektor publik. Karena aksi dari diskresi ini dalam pandangan negatif dapat diperkatakan sebagai menyalahi aturan atau hukum yang berlaku, namun dalam pandangan politik yang positif dapat di sanjung. Sehingga inovasi dan kreatifitas dalam membangun administrasi negara di Indonesia belum di hukumkan, pandangan-pandangan ini hanya sebatas mengartikan secara sempit ataupun secara meluas, dan itupun tergantung atas keputusan segelintir masyarakat yang dipilih jadi wakil rakyat.

Jika seorang manajer merupakan seseorang yang bertanggung jawab atas pencapaian organisasi maka manajemen dapat diartikan sebagai segala tujuan dan aktifitas yang melibatkan arahan organisasi atau salah satu unit dari; perencanaan, organisasi, kepemimpinan, dan pengawasan (Hellriegel, Jackson dan Slocum, 2005). Seperti yang pembaca pahami bahwa seseorang dalam berbagai pekerjaan mengharapkan untuk melakukan sesuatu tujuan, walaupun itu bukan menjadi fokus tujuannya, tujuannya bisa sangat bermacam-macam, bisa *social reasons* ataupun *material reason*. Sedangkan dalam konteks organisasi manajemen dapat diartikan menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai objektif organisasi melalui fungsi perencanaan, organisasi, dan staf, kepemimpinan, dan pengawasan (Andrew J Durbin, 2006).

Koordinasi dapat dilakukan di organisasi yang memiliki hubungan dengan berbagai subdivisi untuk bekerjasama antara pekerja yang ditempatkan dalam struktur kewenangan, sehingga koordinasi perintah dan wewenang dapat dilakukan antara atasan dan bawahan. Dalam tulisan Gullick dan Urwick tersebut ada dua aspek selain koordinasi, yang kedua adalah ide yang juga disebut sebagai serangkaian pembangunan *single intelegensia* untuk dicapai oleh pikiran dan bekerjasama dalam kelompok sehingga setiap pekerja memiliki tujuan dalam mencapai kemampuan dan antusiasme dalam bekerja. Pembangunan *single intelegensia* ini dalam sektor privat menjadi sangat penting, bahkan menjadi roda penggerak dalam kemajuan organisasi. Berbeda dengan organisasi publik yang masih sangat taat pada aturan dan hukum, sehingga pekerja dan pegawai tidak diberi keluasaan untuk bertindak.

Dalam berbagai kesempatan kenaikan jabatan seorang pegawai negeri sipil, dinilai masih sangat terpengaruh dengan budaya kedekatan, budaya kedekatan ini memang tidaklah sepenuhnya salah selama pegawai yang diangkat sebagai pejabat publik ini memiliki kemampuan dan merit secara pengalaman dan keahlian. Kompetensi manajerial di sektor publik ini memang sangatlah sulit untuk menerjemahkannya karena nuansa kekuasaan sangat berperan penting dalam berbagai pengangkatan. Kekuatan politik tingkat atas, menengah atau bawah sangat berperan memilih orang yang tepat dalam lingkup kekuasaan.

Di Indonesia pengaruh kompetensi manajerial ini masih diikuti dengan aktifitas suku, ras, golongan, agama dan etnik. Tidak jarang dalam berbagai organisasi di pusat ketika salah satu etnik berkuasa maka secara pasti akan mewarnai pengambilan keputusan berdasarkan etnik tersebut. Aktifitas ini disebut dengan aktifitas *primordial* dan *feodal*. Dalam berbagai kompetensi yang coba dijalankan oleh para pengambil keputusan ini adalah untuk melindunginya. Dalam pandangan penulis aktifitas ini sangatlah wa-

jar karena Indonesia merupakan negara multi etnik, agama dan sebagainya sehingga berbagai kepentingan sangat perlu diamankan.

Berbagai literatur menjelaskan bagaimana melihat kompetensi seorang manajer secara objektif, seperti yang ditawarkan oleh Hellriegel, Jackson, dan Solum (2007), mereka mendefinisikan bahwa untuk melihat kompetensi seorang manajer publik perlu memperhatikan aspek komunikasi, perencanaan dan administrasi, kerja tim, strategi aksi, pemahaman global dan glocal, dan manajemen diri. Penulis melihat jika seorang pemimpin publik diangkat perlu juga memperhatikan keenam aspek ini. Seseorang di beri amanah untuk memimpin organisasi publik perlu diisi dengan seorang manajer publik yang memiliki kompetensi secara obyektif. Komunikasi merupakan hal yang paling terpenting karena dengan komunikasi tiga arah maka seorang manajer publik tidak mengambil keputusan publik secara sepihak dan mendapatkan legalisasi dari pegawai dan masyarakat sebagai *stake holders*. Pegawai merupakan pengeksekusi dari peran-peran manajer, oleh karena itu pegawai perlu memahami suatu perintah dengan jelas agar mampu menjembatani ke abu-abuan dari berbagai pemahaman seorang pegawai dalam mengintepretasikan perintah.

Perencanaan dan administrasi merupakan hal yang sangat terpenting dalam memahami awal dari tercapainya suatu tujuan publik, oleh karena itu seorang manajer publik ketika dipilih harus memiliki visi dan misi yang jelas dengan berbagai perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan organisasi. Sebagai organisasi yang kompleks maka organisasi publik perlu adanya fungsionalisasi peran dari setiap departemen oleh karena itu setiap departemen ini perlu memahami pentingnya kerja tim sebagai pola kerja yang berguna untuk mengurangi resiko departemen terjadi perpecahan.

Dalam berbagai kurikulum yang ada di Indonesia tidak jarang calon sarjana administrasi publik selalu dibekali dengan mata kuliah manajemen strategis. Ini merupakan hal yang menurut penulis dirasakan cukup penting, karena dengan langkah yang strategis yang perlu diambil oleh manajer publik memerlukan pemahaman isu-isu yang strategis.

Perubahan Secara Evolusioner dalam Satu Dasawarsa

Paham manajerialisme di Indonesia ini bergerak pada 10 tahun terakhir ketika reformasi bergulir, pergerakan inilah diilhami oleh keinginan masyarakat Indonesia untuk berubah total, ketika pada awal millenium dimulai sekitar tahun 1998-2000, Indonesia mengalami perubahan struktur politik yang sangat evolutif, ini dicirikan dengan membangun kepercayaan publik untuk menjadi lebih besar dibandingkan dengan masa sebelum reformasi. Pada saat sebelum reformasi ide manajerialisme modern ini belum terlalu diterapkan karena Indonesia saat itu dalam cengkraman politik yang otoriter, sehingga tidak memungkinkan adanya perubahan manajemen yang secara mendasar.

Perubahan lingkungan manajerial terjadi justru setelah Indonesia mengalami perubahan rezim, perubahan ini yang besar terutama dengan adanya desentralisasi di daerah-daerah. Desentralisasi ini kemudian menjadikan pemerintahan di daerah lebih bertenaga, namun tidak jarang ada pemerintahan di daerah yang justru semakin

melemah, karena isu pembangunan regionalistik menjadi lebih mengedepan daripada isu pembangunan secara nasional.

Pemahaman tentang lingkungan yang berubah dari para manajer publik ini harus terbuka secara global dan glokal oleh karena itu tidaklah jarang ketika lingkungan suatu organisasi publik perlu meningkatkan pemahamannya tentang dunia luar dan dunia sekitarnya. Lingkungan global menawarkan tantangan dari dunia yang sangat asing sedangkan lingkungan glokal menawarkan lingkungan sekitar yang berubah karena pengaruh global.

Untuk menghargai diri sendiri yang merupakan bagian dari organisasi publik maka diperlukan integritas dalam manajemen diri, di Indonesia berbagai macam ditawarkan dalam manajemen diri ini, seperti pendidikan emosional atau motivasi yang sekarang sedang marak di Indonesia. Dimana pekerjaan dan kehidupan manusia dianggap sama-sama penting. Dengan semangat desentralisasi tadi maka semakin besar juga pengaruhnya pada pembangunan manajerial di daerah-daerah yang dulu dianggap memiliki kinerja buruk.

Kesimpulan

Perspektif manajerialisme dalam administrasi negara ini pada akhirnya adalah salah satu jalan keluar bagi bangsa ini untuk keluar dari kemelut yang berkepanjangan, karena dengan penerapan manajerialisme yang profesional, akuntabel dan transparan akan semakin memperbesar harapan publik akan pemerintahannya. Dengan semakin kuatnya kepercayaan publik ini pemerintah ketika memberikan atau melaksanakan suatu aktifitas untuk masyarakat lebih mudah dan keberhasilan pembangunan akan semakin tampak.

Pandangan manajerialisme dalam transformasi administrasi negara ini pada akhirnya akan menjadi perpesktif baru bagi ilmu administrasi negara di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bennett, Robert (ed). 1994. *Local Government and Market Decentralization: Experiences in Industrialized, Developing, and Former E*
- Blau, Peter M. dan Marshal W. Meyer. 1987. *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: Penerbit UI Press.
- Caiden, Gerald E. 1976. *Implementation - The Achilles Heel of Administrative Reform in Arne F Leemans, The Management of Change in Government*. The Hague.
- David Osborne dan Ted Gaebler, *Mewirusahaakan Birokrasi*, terj. Abdul Rasyid, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1996.
- David osborne dan Peter Plastrik, *Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha*, terj. Abdul Rasyid dan Ramelan, Jakarta: PPM, 2000.
- Koehler, Jerry W. dan Pankowski, Joseph M. 1997. *Transformational Leadership in Government*. Florida : St. Lucie Press.
- Saefullah, A. Djadja. 2002. "Birokrasi dan Fenomena Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme" Makalah. Disampaikan dalam Seminar Nasional Reformasi Birokrasi di Era Otonomi Daerah, Bandung.
- Thoha, Miftah (1990), *Netralitas Birokrasi di Indonesia dalam Membangun Martabat*

Manusia, Peran Ilmu-Ilmu Social dalam Membangun, Gajah Mada Press, Yogyakarta

Weber, Max. 1987. "Tipe-tipe Otoritas (Gezag en Bureaucratie)". Dalam H.G. Surie (ed).
Ilmu Administrasi Negara: Suatu Bacaan Pengantar. Jakarta: PT Gramedia.

Miftah Thoha, *Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press, cet. keVIII, 2003. Inu
Kencana Syafi'i, dkk., *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta: Rineka cipta, 1999.

Weber, Max (edited by Robert K Merton,Cs) *The Esencial of Bureaucracy Organization:
An Ideal-Type Contruction*, Journal, free Press),

TRANSFORMASI ADMINISTRASI NEGARA : PERSPEKTIF MANAJERIALISME

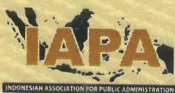
Editor:
Simon Supriani
Heru Nurca
Iqbal Suprayogi Sugandi

TRANSFORMASI ADMINISTRASI NEGARA: PERSPEKTIF MANAJERIALISME

Perkembangan Ilmu Administrasi Negara pada saat ini dirasakan cukup pesat di Indonesia, ini diperlihatkan dengan semakin tumbuhnya lembaga-lembaga pendidikan maupun non-pendidikan yang bergerak di bidang administrasi negara. Administrasi negara sendiri di Indonesia memiliki berbagai sudut pandang yang berbeda-beda pandangan.

Ada dua pandangan atau perspektif yang tertarik akan diangkat dalam judul buku ini, perspektif pertama adalah perspektif manajemen dan kedua adalah perspektif politik dan kebijakan publik. Dalam sudut pandang manajemen sendiri administrasi negara ditempatkan sebagai pelaksana dan pengesekusi berbagai aktifitas di dalam negara, sedangkan dalam perspektif politik dan kebijakan publik, administrasi negara dipandang sebagai perancangan dan pengevaluasi aktifitas di dalam negara. Aktifitas-aktifitas ini kemudian yang saling lengkap melengkapi dari perkembangan administrasi negara di Indonesia.

Perkembangan ini diindikasikan dengan semakin dinamisnya ilmu ini dengan berbagai perkembangan nomenklatur, mulai dari ilmu tata negara, administrasi negara, administrasi publik dan yang sampai mutakhir ini ilmu manajemen dan kebijakan publik. Perkembangan inilah yang dijanjikan oleh tumbuh dan berkembangnya suatu ilmu, pandangan ini di landasi oleh pemikiran Rosenbloom dan Kravchuck (2009) tentang core ilmu administrasi negara antara lain hukum, politik dan manajemen, perspektif ini juga didukung oleh Eran V. Gadot (2001) yang menuliskan core ilmu administrasi negara itu antara lain organisasi dan bisnis, ilmu budaya dan sosiologi serta politik dan kebijakan publik.



REFERENSI

ISBN 978-602-99311-2-9



9 786029 931129